

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEY PERFORMANCE INDICATOR OLEH
INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN MENGURANGI KORUPSI
KEPALA DESA**

Wahyu Rio Shendy Kusuma, Teguh Yuwono

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman <https://fisip.undip.ac.id/>
E-mail fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Key Performance Indicator* (KPI) oleh Inspektorat Kabupaten Kendal sebagai strategi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mengurangi potensi korupsi di tingkat kepala desa. KPI digunakan sebagai alat pengukuran kinerja yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan KPI oleh Inspektorat Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KPI telah berkontribusi pada peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Inspektorat mampu mendeteksi penyimpangan lebih dini melalui indikator-indikator yang jelas, sehingga mendorong kepala desa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Namun, terdapat kendala dalam implementasi KPI, seperti kurangnya pemahaman kepala desa dan perangkatnya terhadap konsep KPI, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di Inspektorat, serta resistensi terhadap perubahan yang dianggap membebani secara administratif. Selain itu, tantangan teknis seperti kurangnya dukungan teknologi dalam pengumpulan dan analisis data kinerja menjadi hambatan lain yang harus diatasi. Meski begitu, penerapan KPI secara keseluruhan menunjukkan potensi

besar dalam membentuk budaya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan responsif. Peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Kendal melalui KPI juga memberikan efek pencegahan terhadap praktik korupsi yang kerap terjadi di desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi pendukung, serta pelatihan berkelanjutan bagi kepala desa dan perangkatnya untuk mengoptimalkan penerapan KPI. Dengan langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa semakin baik, masyarakat merasakan dampak positifnya, dan risiko korupsi dapat diminimalkan secara signifikan.

Kata kunci: Key Performance Indicator, Inspektorat Kendal, good governance, pengawasan, korupsi kepala desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Key Performance Indicators (KPI) by the Inspectorate of Kendal Regency as a strategy to support good governance and reduce potential corruption at the village head level. KPI is used as a performance measurement tool focusing on transparency, accountability, and effectiveness in village government administration. This study employs a descriptive method with a qualitative and quantitative approach, involving in-depth interviews, observations, and document analysis related to the implementation of KPIs by the Kendal Inspectorate. The results indicate that the implementation of KPIs has contributed to improved oversight and accountability in village governance, particularly in budget management and program implementation. The Inspectorate has been able to detect irregularities earlier through clear indicators, encouraging village heads to take greater responsibility in performing their duties. However, challenges in KPI implementation include a lack of understanding among village heads and their staff about KPI concepts, limited competent human resources in the Inspectorate, and resistance to changes perceived as administratively burdensome. Additionally, technical challenges such as insufficient technological support for data collection and performance analysis further hinder progress. Nevertheless, the overall implementation of KPIs demonstrates significant potential in fostering a culture of cleaner, more transparent, and responsive governance. The enhancement of the Kendal Inspectorate's oversight quality through KPIs also provides a preventive effect against corruption practices frequently occurring in villages. This study recommends strengthening human resource capacity, improving technological support, and providing continuous training for village heads and their staff to optimize KPI implementation. Through these measures, it is expected that village governance will improve, citizens will experience positive impacts, and corruption risks can be significantly minimized.

Keywords: Key Performance Indicators, Kendal Inspectorate, good governance, oversight, village head corruption.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas, menjadi kerangka dasar yang perlu diterapkan oleh setiap organisasi pemerintah. Salah satu instrumen yang mendukung pelaksanaan prinsip ini adalah Key Performance Indicators (KPI), yaitu alat ukur kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Inspektorat Kabupaten Kendal memiliki peran strategis sebagai pengawas internal pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa. Namun, tingginya angka kasus korupsi di tingkat desa, seperti penyelewengan dana desa dan penyalahgunaan wewenang, menjadi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Berdasarkan laporan tahun 2023, Kabupaten Kendal mencatat setidaknya lima kasus besar penyalahgunaan dana desa dengan total kerugian negara mencapai Rp4,8 miliar. Tantangan ini menegaskan pentingnya strategi pengawasan yang terukur dan efektif, salah satunya melalui implementasi KPI. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi KPI dapat berkontribusi dalam meningkatkan

tata kelola pemerintahan desa dan mengurangi korupsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kombinasi (*mixed methods*), yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam serta pengukuran objektif terkait implementasi KPI oleh Inspektorat Kendal.

1. **Desain Penelitian**

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan KPI, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara implementasi KPI dan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis *embedded design* untuk mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif secara holistik.

2. **Teknik Pengumpulan Data**

o **Wawancara**

Mendalam:

Dilakukan dengan pejabat Inspektorat, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Pertanyaan wawancara mencakup pemahaman tentang

KPI, tantangan implementasi, dan dampaknya pada tata kelola pemerintahan.

- **Kuesioner:**
Disebarkan kepada perangkat desa untuk mengukur pemahaman mereka tentang KPI, tingkat kepatuhan terhadap indikator, dan persepsi terhadap pengawasan Inspektorat.
- **Dokumentasi:**
Melibatkan analisis dokumen resmi seperti laporan audit, laporan kinerja, dan regulasi terkait.
- **Observasi Lapangan:**
Melibatkan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan KPI di Inspektorat Kendal dan pemerintahan desa terkait.

3. Analisis Data

- Data kualitatif dianalisis menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar-variabel.

- Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif, termasuk penghitungan rata-rata, frekuensi, dan korelasi antara variabel implementasi KPI dengan prinsip-prinsip *good governance*.

HASIL PENELITIAN

Dalam keseluruhan analisis ini, terlihat bahwa KPI memberikan kontribusi positif dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan desa di Kabupaten Kendal, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang menghambat implementasinya. KPI membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pengurangan korupsi, meskipun pengawasan yang lebih intensif dan konsisten masih perlu diupayakan. Inspektorat memiliki peran yang sangat krusial dan strategis dalam pengawasan ini, namun perlu adanya penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM serta anggaran. Kolaborasi yang lebih baik antar stakeholder juga menjadi faktor penting untuk memaksimalkan efektivitas KPI.

Jika semua langkah tersebut dapat diterapkan, maka KPI dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap kesejahteraan

masyarakat desa melalui pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

Kesimpulan Metode Triangulasi

Berdasarkan analisis triangulasi yang melibatkan tiga aspek data yaitu: data kuantitatif, Kesimpulan kualitatif dari transkrip wawancara, dan hasil analisis kualitatif dari pertanyaan serta jawaban terkait KPi dalam pengawasan desa, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Key Performance Indicator* (KPI) oleh Inspektorat Kabupaten Kendal memiliki dampak positif, namun juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya lebih efektif

a. Dampak positif implementasi KPI terhadap transparansi dan akuntabilitas

1) Data kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan anggaran desa, dengan desa Ngampel Wetan melaporkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih tertib sejak penerapan KPI.

2) Analisis kualitatif dari transkrip mencatat bahwa

KPI berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Tingkat desa, dengan beberapa desa melakukan konsultasi aktif kepada inspektorat mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran.

3) Hasil Analisis pertanyaan dan Jawaban mengungkapkan bahwa KPI telah membantu beberapa desa dalam meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan. Meskipun demikian, masih ada aspek yang harus didorong untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan, yang menjadi tantangan dalam mewujudkan prinsip *good*

governance dengan maksimal.

b. Pengaruh KPI terhadap pengurangan korupsi

- 1) Data Kuantitatif menunjukkan bahwa penerapan KPI berperan dalam menurunkan temuan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat desa, meskipun angka temuan masih belum ditemukan.
- 2) Analisis kualitatif dari transkrip mencatat bahwa KPI membantu dalam pengawasan berbasis resiko, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, yang berkontribusi pada penurunan potensi korupsi.
- 3) Hasil analisis pertanyaan dan jawaban dari inspektorat kabupaten kendal menegaskan bahwa KPI membantu mencegah penyalahgunaan

anggaran desa, dengan fokus pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang semakin sesuai dengan ketentuan. Inspektorat juga mengakui bahwa penerapan KPI masih perlu ditingkatkan terutama dalam pengawasan tindak lanjut aduan dan pengawasan yang lebih intensif.

c. Kendala dalam implementasi KPI

- 1) Data Kuantitatif mengungkapkan bahwa kendala utama dalam implementasi KPI adalah keterbatasan SDM untuk pengawasan, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang optimal.
- 2) Analisis Kualitatif dari transkrip mengidentifikasi

masalah di mana kekurangan jumlah tim [engawas dan kompetensi yang belum memenuhi standar serta terbatas menjadi penghambat utama dalam penerapan KPI yang efektif. Selain itu, anggaran pengawasan yang kurang mencukupi dan sarana prasarana yang terbatas semakin memperburuk kondisi ini.

- 3) Hasil Analisis pertanyaan dan jawaban dengan inspektorat kabupaten kendal menunjukkan bahwa inspektorat juga menghadapi tantangan dalam pengawasan yang terbatas dengan hanya sekitar 40 orang untuk mengawasi 266 desa. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan penambahan anggaran menjadi

rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan

d. Implikasi Triangulasi terhadap Implementasi KPI

Berdasarkan triangulasi antara data kuantitatif, kualitatif dari transkrip wawancara dengan kepala desa, dan analisis pertanyaan serta jawaban dari inspektorat kabupaten Kendal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun penerapan KPI oleh Inspektorat Kabupaten Kendal memberikan dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengurangan korupsi, ada sejumlah kendala yang harus diatasi agar KPI dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan dari Inspektorat serta peningkatan jumlah dan kompetensi SDM untuk pengawasan serta pemenuhan anggaran dan sarana prasarana pengawasan yang lebih memadai adalah langkah konkrit dan pasti yang sangat diperlukan. Selain itu, meskipun KPI sudah mulai mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan serta memperbaiki sistem pengaduan yang lebih efisien. Jika kendala tersebut dapat diatasi, penerapan KPI tentu sangat berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan

Masyarakat desa melalui pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan akuntabel dan bebas dari korupsi.

e. Analisis Embedded

Berdasarkan analisis Embedded Design, penerapan KPI di Kabupaten Kendal telah memberikan dampak positif terhadap tata Kelola desa, khususnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengurangan potensi korupsi. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan SDM pengawas, anggaran, serta konsistensi dalam penerapan KPI menjadi hambatan di hal-hal itu. Integrasi antara data kualitatif dan kuantitatif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Data kualitatif menunjukkan aspek perbaikan dalam indikator tata Kelola, sementara data kuantitatif meng Highlight tantangan dan faktor pendukung di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas KPI, berikut metode yang diperlukan :

1. Penguatan kelembagaan Inspektorat dan pemabahan jumlah pengawas.

2. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan yang lebih luas dan sistematis.
3. Penyediaan anggaran dan sarana prasarana pengawasan yang memadai.
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengatasi kendala tersebut, diharapkan penerapan KPI dapat berjalan lebih konsisten dan berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa melalui tata kelola baik pemerintah daerah dan pemerintah desa yang lebih baik.

Kesimpulan

1. Implementasi KPI di Inspektorat Kabupaten Kendal telah dicoba. Dalam praktiknya, KPI menjadi panduan yang penting untuk mendukung pengawasan yang terstruktur melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Penelitian ini menunjukkan bahwa

implementasi *Key Performance Indicators* (KPI) oleh Inspektorat Kabupaten Kendal telah mencapai skor **90,50**, dengan kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan upaya yang signifikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Angka ini juga menggambarkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, skor ini mengindikasikan masih adanya ruang untuk perbaikan dalam penerapan beberapa indikator tertentu. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan resistensi terhadap perubahan tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Dengan meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan yang lebih terukur, diharapkan skor ini dapat ditingkatkan lebih

lanjut, sehingga tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Kendal dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Implementasi ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan SDM pengawas, kurangnya anggaran yang memadai, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan lebih efektif.

Frekuensi pengawasan terhadap desa juga terbatas dengan rotasi pengawasan regular yang hanya dapat dilakukan setiap 7-10 tahun sekali untuk setiap desa. Meskipun demikian, adanya pendampingan yang intensif dan konsultasi teknis oleh Inspektorat telah membantu kepala desa memahami KPI, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.

2. KPI di Inspektorat Kendal telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya KPI, desa Ngampel Wetan terbukti sudah mempublikasikan

informasi anggaran dan pelaksanaan proyek secara lebih terbuka melalui papan informasi atau media lainnya. Akuntabilitas kepala desa juga meningkat terlihat dari pelaporan yang lebih tertib dan sesuai dengan aturan. Pendampingan oleh Inspektorat juga mendorong kolaborasi antara aparat desa dan masyarakat dalam perencanaan Pembangunan. Namun, efektivitas ini masih terbatas pada aspek administratif, sedangkan pengawasan teknis di lapangan belum maksimal akibat kurangnya personil untuk terjun langsung dan masih minim kompetensi teknis untuk mengelola KPI ini.

3. Penerapan KPI di Inspektorat Kendal berperan penting dalam menekan praktik korupsi di Tingkat desa terutama melalui pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran. Desa dapat jauh lebih tertib

dalam penyusunan PBDes ketika tahu acuan dari ketentuan yang berlaku. Inspektorat juga dapat dengan mudah menangani pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dan memberikan klarifikasi atau tindakan korektif dengan mudah ketika dapat di track dengan KPI secara komprehensif. Meski begitu, kelemahan dalam pengawasan teknis terhadap proyek-proyek fisik masih membuka peluang untuk adanya penyimpangan. Hambatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung yang memadai.

Saran

1. Untuk memperkuat pondasi implementasi KPI, Inspektorat Kabupaten Kendal perlu meningkatkan jumlah kompetensi SDM pengawas melalui pelatihan

berkelanjutan. Selain itu, anggaran pengawasan harus diperluas untuk mendukung penyediaan fasilitas seperti penerapan teknologi digital yang mempermudah pengawasan secara real-time untuk mempermudah flow KPI juga. Penyusunan pedoman teknis yang lebih spesifik terkait KPI juga dapat membantu mempermudah penerapannya di lapangan. Memperbanyak sesi pendampingan dan coaching clinic akan memastikan pemahaman yang lebih baik bagi aparatur desa, sehingga KPI dapat diterapkan secara konsisten.

2. Untuk meningkatkan efektivitas KPI dalam

good governance, Inspektorat perlu memperluas pengawasan hingga ke aspek teknis proyek di lapangan dengan melibatkan tenaga ahli atau Kerjasama lintas instansi kalau dirasa belum memiliki SDM yang mumpuni. Inspektorat juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, seperti dashboard monitoring online yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan memantau realisasi data, anggaran, dan progress dari desa. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan Evaluasi desa juga perlu terus dilakukan melalui sosialisasi dan

pelatihan khusus agar KPI dapat berjalan dengan optimal.

3. Inspektorat perlu meningkatkan intensitas pengawasan, terutama pada aspek teknis pelaksanaan proyek fisik di desa. Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai pengawas independen juga dapat membantu meminimalkan potensi korupsi di desa. Misalnya dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara lebih aktif. Penggunaan sistem pelaporan berbasis teknologi, seperti web atau aplikasi aduan *online* juga dapat mempercepat deteksi dini terhadap indikasi korupsi. Edukasi anti korupsi secara rutin kepada aparatur desa dan masyarakat akan

memperkuat budaya integritas yang menjadi kunci pencegahan korupsi.

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Prentice Hall.

Arini, N. (2015). Penerapan Key Performance Indicators dalam Evaluasi Kinerja Organisasi. Jakarta.

Baktiyasal, Rofli Sulistiyo dan Farida, Lena. 2017. Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan (Kasus Bagian Pengolahan PT. Mita Aung Swadaya (MAS Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu).

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/download/3813/3> 046 diakses tanggal 21 Februari 2019.

Dwiyanto, A. (2005). *Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Effendi, M. (2016). Peran Inspektorat dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*

dan Keuangan Daerah, 5(2), 121-135.

Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Organisasi dan Manajemen*. Cetakan pertama.

Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta.

H.M. Yasin. (2018). *Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah (Inspektorat Daerah)*. Pusaka Almaida : Gowa.

Hidayat, Taufiq. (2018). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung.

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/download/1304/11> 48 diakses 13 Maret 2019.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen. Edisi revisi. Cetakan ketujuh*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Notoatmodjo, S. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

P. Robins, Stephen. (1990). *Teori*

- Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Rachman, A. (2017). "Peran Inspektorat Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik". Tesis, Universitas Indonesia.
- Ramadian, P., & Kamil, I. (2012). Perancangan Standar Penilaian Kinerja Pemeliharaan Lampu Jalan Berdasarkan Key Performance Indicators (KPI's): Studi Kasus Kota Padang. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 11(2), 225-234.
- Richard, J. (2010). *Strategic Planning and Organizational Goals*. New York: McGraw-Hill.
- Rossevelt, Asido Franklin, Domai, Tjahjanulin dan Surwondo. 2015. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang).
- Santoso, B. (2018). Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Pengawasan*, 7(3), 201-215.
- Sari, D. W. (2019). "Pengaruh Kualitas Audit Inspektorat terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah". Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- Soemohadiwidjojo, A. T. (2015). *Panduan Praktis Menyusun Key Performance Indicator*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan keempat. Bandung: Alfabet.
- Thoha, Miftah. (2011). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Veithzal Rivai. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijayanti, S., & Nugroho, A. (2019). "Innovation in Internal Audit: The Role of Inspectorates in Indonesia". *Proceedings of the National Symposium on Public Sector Accounting*, 95-110.

